

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Aceh identik dengan julukan Serambi Mekkah. Menurut A. Hasjmy bahwa Aceh disebut Serambi Mekkah karena peran dan pengaruhnya dalam penyebaran agama Islam (Amiruddin, 2006). Bukan hanya itu, Menurut Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian, ada seorang Tengku di Aceh meninggalkan risalah yang mengatakan bahwa di masa itu masyarakat Aceh secara keseluruhan beragama Islam (Amiruddin, 2006). Sama halnya keadaan seperti di kota suci Mekkah bebas dari orang selain beragama Islam. Sehingga muncul rasa yang sama seperti keadaan di Mekkah, hal itu muncul dan diucapkan oleh beberapa ulama di Aceh. Namun walaupun identik dengan julukan Serambi Mekkah dan juga keislamannya, Aceh yang berada di dalam Pulau Sumatera menjadi bagian dari Provinsi Indonesia, pernah mengalami konflik dengan Pemerintah Indonesia.

Konflik di Aceh dengan Pemerintah Indonesia yang cukup lama dimulai pada Pemerintahan Orde Baru atau ketika Presiden dipimpin oleh Soeharto. Beberapa faktor melatarbelakangi konflik yang terjadi di Aceh, dari segi ekonomi dan politik. Dengan adanya latar belakang konflik tersebut, mengakibatkan muncul keinginan kelompok masyarakat di dalam negara untuk mempunyai suatu bentuk kekuasaan sendiri dalam mengatur wilayahnya (Suhardono, 2015). Hal itu ditunjukkan dengan adanya gerakan separatis yang ingin memerdekakan diri dari negara yang berdaulat dan mendirikan negara merdeka oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirinya dirugikan akibat kebijakan pemerintah yang sentralistik (Suhardono, 2015).

Tengku Hasan Muhammad di Tiro memproklamasikan Aceh Merdeka, pada tanggal 4 Desember 1976 dan menjadikan tanggal tersebut sebagai hari berdirinya Aceh Merdeka (Basyar M.Hamdan, 2008). Gerakan ini dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah Indonesia merespon gerakan itu sebagai gerakan pengacau stabilitas keamanan negara. Oleh

karena itu, Pemerintah Indonesia dalam menangani Gerakan Aceh Merdeka memiliki penanganan yang berbeda, seperti pada masa Pemerintahan Orde Baru penanganan ditangani dengan pendekatan militer. Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer serta tidak adanya pendekatan dialog dalam menyelesaikan konflik. Setelah lengsernya Orde Baru pada tahun 1998, adanya perubahan politik Indonesia menuju masa Reformasi, dimana pemerintahan lebih bersifat terbuka dan demokrasi. Dalam hal ini pemerintah mulai melakukan suatu usaha untuk menyelesaikan konflik atau rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dimulai pada masa Presiden B.J. Habibie, pemerintah menyelesaikan masalah Gerakan Aceh Merdeka dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) (Basyar M.Hamdan, 2008). Pendekatan tersebut belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Usaha untuk menyelesaikan konflik pun masih berlanjut hingga masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, penanganan yang dilakukan dalam konflik tersebut menggunakan pendekatan dialog yang menghasilkan suatu perjanjian dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk dapat menyelesaikan konflik secara damai. Namun kedua perjanjian tersebut mengalami kegagalan.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengalami jalan buntu dalam menyelesaikan konflik. Pada tanggal 19 Mei 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan penandatanganan darurat militer di Aceh (Djumala, 2013), hal itu membuat Aceh ditetapkan sebagai darurat militer. Gagalnya komunikasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka disebabkan karena memiliki pemahaman masing-masing terhadap isi dari perjanjian itu sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam usaha untuk menyelesaikan konflik, ada beberapa hal yang paling utama, diantaranya adanya perubahan dalam sikap kedua belah pihak untuk saling percaya satu sama lain, dengan tujuan dapat menyelesaikan konflik secara damai tanpa pendekatan bersenjata. Hubungan dengan kelompok yang dianggap musuh direkonstruksi menuju

hubungan yang saling bermanfaat. Kedua belah pihak yang berkonflik harus berani mengambil resiko untuk hubungan yang baru agar timbul rasa percaya satu sama lain (Malik, 2017).

Dua faktor itu yang dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Pendekatan dilakukan dalam menangani Gerakan Aceh Merdeka menggunakan pendekatan dialog tanpa memandang GAM sebagai musuh, tetapi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 29 Tahun konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM dapat diselesaikan melalui Perjanjian Damai Helsinki atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, di kota Helsinki, Finlandia. *Memorandum of Understanding* adalah dasar dalam menyusun kontrak yang dihasilkan pada permufakatan bersama, baik tertulis maupun lisan (Marni et al., 2018). Kesepakatan bersama itu harus dimasukkan dalam kontrak, sehingga memiliki kekuatan yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian disepakati bersama untuk dapat menyelesaikan konflik secara damai tanpa lagi menggunakan pendekatan senjata.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Jayanti (2010) yang berjudul "*Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintahan Pusat Di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005*". Penelitian tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana proses perundingan yang terjadi Helsinki, Finlandia dalam penyelesaian konflik. Karena dalam proses perundingan itu, terciptanya rasa saling percaya satu sama lain untuk mengakhiri konflik Aceh secara damai tanpa menggunakan pendekatan keamanan. Perundingan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan perwakilan GAM dilakukan selama lima putaran perundingan, dimulai dari putaran pertama pada bulan Januari 2005 hingga putaran kelima atau terakhir terjadi pada Juli 2005. Dalam proses perundingan itu, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka membicarakan beberapa pokok perjanjian diantaranya: Aceh dibentuknya pemerintahan sendiri, partisipasi di bidang politik, ekonomi, peraturan

tentang hukum dan hak asasi manusia, pengampunan serta pengurangan masa tahanan dan anggota GAM kembali ke dalam masyarakat Aceh dalam terwujudnya reintegrasi, peraturan dalam keamanan, serta tim yang memonitoring perjanjian damai di Aceh. Semua yang telah dibahas, lalu disepakati bersama dan dituangkan ke dalam Perjanjian Damai pada tanggal 15 Agustus 2005. Hamid Awaluddin sekaligus ketua delegasi perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan Malik Mahmud sebagai perwakilan dari GAM melakukan penandatanganan perjanjian damai itu. Perjanjian tersebut dapat terselesaikan secara damai juga karena adanya fasilitator dari organisasi internasional, *Crisis Management Initiative* (CMI), lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, dengan Martti Ahtisaari sebagai mediator dalam perundingan. Martti Ahtisaari merupakan mantan Presiden Finlandia.

Perjanjian damai Helsinki membuat suatu perubahan terhadap kondisi di Aceh dari konflik bersenjata ke perdamaian dengan melakukan perundingan. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak lepas menjadi negara merdeka. Perjanjian Damai Helsinki sangat menarik dibahas, terlebih perjanjian tersebut dapat menyelesaikan konflik di Aceh selama 29 tahun. Padahal sebelum adanya Perjanjian Damai Helsinki, Pemerintah Indonesia di masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan perjanjian namun mengalami kegagalan. Hal itulah yang menarik, bagaimana Perjanjian Damai Helsinki ini dapat menyelesaikan konflik dan menjadi pembeda dengan perjanjian sebelumnya.

Sebagai bahan pembanding penelitian relevan dan sesuai dengan tema penelitian ini, peneliti membandingkan dengan skripsi dengan judul “*Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial, dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)*” karya Nasruddin mahasiswa dari Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Sunan Kalijaga tahun 2014. Fokus penelitian menjadi perbedaan dengan penelitian ini. Skripsi milik Nasruddin

membahas mengenai bagaimana konflik GAM-RI berdampak terhadap rakyat Aceh dalam hal beragama, sosial, serta politik, sedangkan milik peneliti terfokus kepada Perjanjian Damai Helsinki yang dapat menyelesaikan konflik, serta kebijakan setiap Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Perjanjian Damai Helsinki: Akhir Konflik GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (1976-2005) dibatasi baik secara temporal (waktu) maupun spasial (tempat). Batas waktu dalam penelitian adalah tahun 1976-2005. Pada tahun 1976 merupakan tahun berdirinya Gerakan Aceh Merdeka dan menjadi awal konflik dengan Pemerintah Indonesia, tahun 2005 sendiri merupakan akhir dari konflik antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia dengan adanya Perjanjian Damai Helsinki. Batasan spasial pada penelitian ini difokuskan pada dua wilayah: Aceh sebagai wilayah Gerakan Aceh Merdeka dan Jakarta sebagai pusat pemerintah Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Dengan dasar pemikiran yang dijelaskan, diperoleh perumusan masalah pada penelitian ini:

- a. Apa latar belakang berdirinya Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976.
- b. Bagaimana rekonsiliasi Pemerintah Indonesia dalam menangani Gerakan Aceh Merdeka dari mulai masa Pemerintahan Presiden Soeharto hingga masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005.
- c. Bagaimana proses perundingan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka hingga menghasilkan Perjanjian Damai pada tahun 2005.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini:

- a. Mengetahui latar belakang berdirinya Gerakan Aceh Merdeka
- b. Mengetahui rekonsiliasi Pemerintah Indonesia dalam menangani Gerakan Aceh Merdeka
- c. Mengetahui bagaimana proses perundingan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka dalam penyelesaian konflik hingga melahirkan Perjanjian Damai Helsinki.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, dua kategori kegunaan penelitian:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menjadi salah satu sumber penelitian bagi pembaca, baik untuk mahasiswa maupun mahasiswi atau peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian mengenai konflik yang terjadi di Aceh, Pemerintah Indonesia dan GAM dalam periode 1976-2005.

b. Kegunaan Praktis

Selain itu, penelitian ini berguna sebagai informasi kepada pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai konflik yang terjadi di Aceh yang dapat diselesaikan melalui proses perundingan damai tanpa adanya lagi pendekatan bersenjata dengan berbagai usaha pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Cara dilakukan untuk menganalisis serta mempermudah dalam proses penelitian. Penelitian sejarah merupakan metode yang digunakan dalam penelitian, dengan mengutamakan kepada riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau penyelidikan dalam penelitian adalah rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan

mengumpulkan data kepustakaan baik membaca maupun mencatat serta menganalisis hasil penelitian yang telah dikumpulkan (Zed, 2014).

Penelitian sejarah sendiri merupakan proses dalam menguji dan berpikir kritis untuk menganalisis penemuan peninggalan di masa lalu (Gottschalk, 2008). Metode penelitian sejarah dibagi dalam beberapa tahap: heuristik, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, serta historiografi atau penulisan sejarah. Berikut tahap penelitian sejarah:

a. Heuristik

Kegiatan dalam mencari sumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Diutamakan sumber harus sesuai dengan jenis penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2013). Tahap ini peneliti melakukan research dan pengumpulan sumber data berupa arsip, surat kabar, jurnal artikel maupun buku yang akan digunakan untuk menunjang penelitian. Sumber-sumber peneliti dapatkan dari terbitan kompas, tempo, dan Serambi Indonesia yang berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di, Jalan Salemba, Jakarta Pusat Lt.7. Kemudian buku yang didapat peneliti sebagai bahan pengumpulan data berasal dari Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat dan sebagian milik pribadi peneliti.

b. Verifikasi atau Kritik Sumber

Proses selanjutnya adalah kritik sumber yang terdiri dari dua langkah: *autentisitas* dengan melihat keaslian sumber atau dikenal dengan kritik ekstern dan kredibilitas data dengan melakukan kritik intern. Kritik intern yang dilakukan penulis salah satunya adalah membandingkan isi buku. Buku yang peneliti bandingkan adalah *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam* oleh Al Chaidar dengan *Sejarah dan Tujuan Pemberontakan GAM Menurut Hukum Internasional* oleh Yusuf Al Qardhawy. Kedua buku tersebut menjelaskan tentang Sejarah Gerakan Aceh Merdeka namun dengan pembahasan yang berbeda. Pada buku yang pertama fokus

pembahasan tidak langsung membahas mengenai Gerakan Aceh Merdeka, melainkan pembahasan dimulai dari masa Aceh menjadi sebuah Kerajaan hingga timbulnya konflik dengan tujuan menjadikan Aceh sebagai negara Islam. Pada buku tersebut lebih menitikberatkan konflik terjadi karena kesalahan Pemerintah Pusat (Indonesia) dan kekecewaan rakyat Aceh, dimulai dari masa Soekarno hingga masa Pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Pada buku tersebut, inti dari penulisan adalah rakyat Aceh ingin mewujudkan negara Islam melalui perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Pada buku kedua lebih membahas Gerakan Aceh Merdeka menurut hukum Internasional dan pengakuan Internasional untuk GAM. Periode waktu yang dibahas tidak berakhir pada masa Pemerintahan Orde Baru, melainkan hingga Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai proses perjanjian Helsinki. Tahap selanjutnya kritik eksternal dengan menguji keaslian bahan sumber yang telah diperoleh.

c. Interpretasi atau Penafsiran

Selanjutnya setelah melalui proses kritik sumber, peneliti melakukan interpretasi dengan dua hal yaitu analisis dan sintesis. Analisis sendiri berarti peneliti menelaah hasil penelitian, sedangkan sintesis berarti menyatukan fakta yang telah dikumpulkan. Dalam interpretasi, peneliti melakukan penggabungan semua fakta yang dihasilkan dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan dan harus menganalisis permasalahan dari segala perspektif bukan hanya dari satu sudut pandang.

d. Historiografi

Historiografi atau juga disebut penulisan sejarah adalah suatu proses rekonstruksi yang imajinatif tentang peristiwa masa lalu berdasarkan sumber yang telah diperoleh (Gottschalk, 2008). Pada tahap ini peneliti merangkai sumber yang sudah didapat, fakta-fakta yang ada disusun dan ditulis dengan menyatakan pendapat yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, menggunakan deskriptif-

naratif dengan mendeskripsikan sumber yang valid dan sistematis berupa fakta yang telah melalui proses interpretasi dan dianalisis ke dalam tulisan.

2. Bahan Sumber

Penggunaan sumber penelitian menggunakan sumber, primer dan sekunder. Sumber-sumber arsip baik mengenai Perjanjian Damai Helsinki maupun Gerakan Aceh Merdeka yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Salemba, kompasdata.id, warungarsip.com dan juga buku yang ditulis oleh pelaku sejarah merupakan sumber utama atau primer. Kemudian untuk sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa sumber buku yang ditulis bukan dari pelaku sejarah, surat kabar, dan jurnal artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian skripsi ini, agar mudah memahami dan adanya suatu gambaran singkat mengenai penelitian, maka disusun sistematika penulisan. Pada penelitian ini, peneliti membagi penelitian kedalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode dan Sumber Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : SEJARAH GERAKAN ACEH MERDEKA

- A. Struktur Sosial dan Karakteristik Masyarakat Aceh
- B. Sejarah Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka
- C. Struktur Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka
- D. Tokoh Gerakan Aceh Merdeka
 - 1. Tengku Muhammad Daud Beureueh
 - 2. Tengku Hasan Muhammad di Tiro

BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN GERAKAN ACEH MERDEKA

- A. Masa Pemerintahan Soeharto (Maret 1968–21 Mei 1998)
- B. Masa Pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998–20 Oktober 1999)
- C. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999–23 Juli 2001)
- D. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001–20 Oktober 2004)

BAB IV : PERJANJIAN DAMAI HELSINKI: AKHIR KONFLIK BERSENJATA

- A. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Penyelesaian Konflik Aceh
- B. Faktor Kembalinya Berunding
- C. Tokoh Perundingan Helsinki
 - 1. Pemerintah Indonesia
 - 2. Pihak Gerakan Aceh Merdeka
 - 3. Pihak Internasional
- D. Proses Perundingan Perjanjian Damai Helsinki
 - 1. Perundingan Putaran Pertama: 28-29 Januari 2005
 - 2. Perundingan Putaran Kedua: 21 Februari-23 Februari 2005
 - 3. Perundingan Putaran Ketiga: 12 April-16 April 2005
 - 4. Perundingan Putaran Keempat: 26 Mei-30 Mei 2005
 - 5. Perundingan Putaran Kelima: 12-17 Juli 2005
- E. Penandatanganan dan Isi Perjanjian Damai Helsinki
 - 1. Penandatanganan Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM
 - 2. Isi Perjanjian Damai Helsinki

BAB V : KESIMPULAN